

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada tahun 1947, Jepang meresmikan Konstitusi yang pada pasal 9 berbunyi:

*“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”*

“Bercita-cita tulus untuk sebuah perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, masyarakat Jepang untuk selamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, darat, laut, dan angkatan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipelihara. Hak beligerensi negara tidak akan diakui”

Pasal tersebut secara garis besar membahas mengenai keputusan Jepang untuk menjadi negara yang *non-offensif*. Dengan kata lain, Jepang memfokuskan diri pada perbaikan pembangunan ekonomi, dan menyerahkan sebagian besar permasalahan keamanannya pada Amerika Serikat sebagai aliansi pertahanan, terutama untuk kemungkinan terjadinya invasi dari luar. Kebijakan yang dikenal dengan nama “*Yoshida Doctrine*” ini memiliki prinsip utama pasifisme,<sup>1</sup> dan berhasil membawa Jepang bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Intensitas dinamika dan konstelasi keamanan di kawasan Asia Timur dalam beberapa dekade terakhir mengalami banyak perkembangan dan perubahan yang dinamis. Perang Dingin seperti menjadi momentum bangkitnya negara-negara Asia Timur, yang merupakan salah satu arena persaingan antar dua kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Besarnya potensi sumber daya baik alam maupun manusia menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak negara hegemon untuk menanamkan pengaruh baik politik maupun

---

<sup>1</sup> Pasifisme adalah perlawanan terhadap perang atau kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

ekonomi di kawasan ini. Pasca Perang Dingin, yang ditandai dengan keruntuhan kekuatan besar Uni Soviet pada 1991, turut membangun peluang munculnya multipolaritas dalam politik internasional kawasan Asia Timur, didukung dengan kemajuan kekuatan ekonomi dan militernya.

Instabilitas keamanan yang terjadi di kawasan ini dapat dikatakan karena beberapa persoalan yang terjadi di Asia Timur seperti persengketaan wilayah (teritorial), proliferasi nuklir, terorisme, perlombaan senjata, dan rivalitas negara-negara yang memiliki kekuatan besar.<sup>2</sup> Selain itu, cepatnya pertumbuhan modernisasi dan industrialisasi Asia Timur merupakan salah satu alasan banyak terjadi ketegangan politik maupun sosial. Hal tersebut diikuti dengan semakin berkembangnya isu-isu keamanan kawasan, yang dilatar belakangi oleh kecurigaan antar negara tetangga dalam menjaga dan mencapai kepentingan nasional negara mereka masing-masing. Rivalitas antar negara-negara memiliki kekuatan besar juga berpotensi menimbulkan konflik terbuka antar negara, seperti rivalitas antara Jepang dan China atau Korea Utara dan Korea Selatan. Terdapat beberapa isu keamanan di kawasan Asia Timur, salah satunya adalah ketegangan antara Jepang dengan China terkait klaim kepemilikan kepulauan Senkaku (oleh China disebut kepulauan Diaoyu) yang menjadikan persoalan bagi Jepang dalam hal keamanan nasional dan kedaulatan negaranya, selain itu konflik saudara yang melibatkan dua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara) yang hingga kini masih berlangsung, serta juga Konflik Laut China Selatan dan Konflik Laut China Timur.

Perubahan mendasar kebijakan luar negeri dan reorientasi kebijakan pertahanan Jepang terjadi ketika pemerintah Jepang mengumumkan dokumen resmi mengenai “*National Defence Program Outline*” pada 9 Desember 2004. Garis besar kebijakan pertahanan Jepang yang baru ini pada dasarnya memetakan kebijakan pertahanan Jepang dalam 10 tahun ke depan yang akan menitikberatkan pada program pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat

---

<sup>2</sup> Thomas Wilkin, “Theory and Practice of Coalition Behavior in the Pacific Region: The Case of an American-Japanese-Australian Combination”, Paper dipresentasikan pada *The Annual Meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii*, Mar et 2005, hal 2

utama sistem pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan Jepang.<sup>3</sup>

Sebagai puncak dari perkembangan kebijakan pertahanan Jepang adalah pada tahun 2007, dimana terjadinya peningkatan status JDA (*Japan Defense Agency*) menjadi Kementerian/Departemen Pertahan (*Ministry of Defense*). Dalam perubahan kebijakan militer Jepang tersebut, setidaknya terdapat tiga poin yang dapat diperhatikan, antara lain:<sup>4</sup>

- a. *Pertama*, pertahanan baru ini merupakan keinginan kuat Jepang untuk mendapat pengakuan internasional. Jepang ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus militer dunia. Revisi pasal 9 Konstitusi Jepang menunjukkan keinginan Jepang menjadi “negara normal”.
- b. *Kedua*, perubahan ini juga ingin menunjukkan keinginan Jepang “menjaga jarak” dengan AS dalam aspek pertahanan dan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik.
- c. *Ketiga*, perubahan kebijakan ini secara jelas ingin menunjukkan rivalitasnya dengan China yang sedang pada titik terendah sejak Perang Dingin berakhir. “Gerakan Anti-Jepang” di beberapa kota besar di China Maret 2005, terkait kian meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran China atas kembalinya kekuatan militer Jepang di Asia Timur.

Perubahan nama menjadi Departemen Pertahanan (*Ministry of Defense*) dari yang semula Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defence Agency*) tidak hanya sekedar berganti nama, namun berbagai kewenangan pengambilan keputusan dalam hal keamanan Jepang juga ditambahkan dalam tugas Departemen Pertahanan yang baru, seperti perencanaan anggaran dan juga pengajuan rancangan undang-undang. Selain itu, tidak seperti Badan Pertahanan, dalam perubahannya, Departemen Pertahanan juga dapat ambil bagian untuk menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang.

---

<sup>3</sup>Anak Agung Banyu Perwita. “Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik”. *Analisis CSIS*, Vol. 36, No. 1, Maret 2007, hal. 56.

<sup>4</sup>Anak Agung Banyu Perwita, “Sosok Baru Pertahanan Jepang”. *KOMPAS*, 19 Februari 2007, dalam [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?Aid=7606&coid=1&caid=34&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?Aid=7606&coid=1&caid=34&gid=3), diakses pada 15 September 2013

## **I.2. Rumusan Permasalahan**

Merupakan hal yang menarik dalam perkembangan pengembangan militer Jepang dalam upaya pengimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur yang semakin memanas, terlebih dengan konflik-konflik yang melibatkan Jepang langsung didalamnya, mengingat bagaimana ketergantungan Jepang terhadap Payung Keamanan yang telah disediakan oleh AS sejak pasca Perang Dunia II selama ini, serta bagaimana implikasi kebijakan yang dikeluarkan Jepang pasca parlemen Jepang menyetujui usulan PM Jepang saat itu, Shinzo Abe, untuk membentuk Departemen Pertahanan (*Ministry of Defense*) sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang atau *Japan Defence Agency* pada 9 Januari 2007.

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil sebuah pokok permasalahan terkait permasalahan yang diangkat, yakni: **“Apa saja kebijakan yang dikeluarkan Jepang terhadap dinamika keamanan di Asia Timur periode 2007-2009?”**

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Untuk dapat melihat mengenai kebijakan apa saja yang dikeluarkan pemerintah Jepang pasca kenaikan status pertahanan Jepang.
- b. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana aliansi pertahanan Jepang – AS.
- c. Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika keamanan di kawasan Asia Timur

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Sebagai hasil dari penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

- a. Mengetahui kebijakan pertahanan yang dikeluarkan Jepang pasca pembentukan Departemen Pertahanan sebagai pengganti Badan Pertahanan Jepang pada Januari 2007.

- b. Memahami situasi Asia Timur yang semakin dinamis dan tinggi intensitasnya.

#### 1.4.2. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak terkait ilmu Hubungan Internasional dalam pencarian informasi terkait kebijakan pertahanan Jepang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terkait Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada konsentrasi Pengkajian Strategis, dalam melihat dinamika keamanan di Asia Timur.

#### 1.5. Tinjauan Pustaka

Telah cukup banyak penelitian serta kajian mengenai kekuatan militer Jepang dalam konteks dan landasan yang beragam. Berbagai publikasi baik buku, jurnal, maupun penelitian ilmiah dihasilkan seiring dengan perkembangan kekuatan militer Jepang dalam berbagai segi dan konteks. Hal tersebut telah membuktikan sebagaimana kuat pengaruh Jepang, sebagai salah satu negara aliansi Amerika Serikat, dalam stabilitas system internasional. Adapun tinjauan pustaka ini akan melihat bagaimana sumber-sumber yang telah penulis pilih sebagai bahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kebijakan pertahanan Jepang dalam aliansi Jepang-AS terhadap dinamika keamanan di Asia Timur, antara lain:

Sumber pustaka yang pertama adalah "*Understanding the East Asian Peace*".<sup>5</sup> Buku ini menggambarkan bagaimana situasi di kawasan Asia Timur pasca Perang Dingin, dan berasumsi bahwa perdamaian antar negara Asia Timur pasca Perang Dingin adalah sebuah paradox. Hal tersebut dikarenakan Asia Timur sebagai wilayah yang memiliki sejarah konflik militer, tempat bagi sebagian besar konflik militer diseluruh dunia, dan sejumlah *flashpints* kritis yang belum terselesaikan. Buku ini menjelaskan mengenai tiga konflik di Asia Timur yang berkaitan dengan China, antara lain Isu Taiwan, konflik South China Sea, dan

---

<sup>5</sup> Mikael Weissman, "*Understanding the East Asian Peace*", (Göteborg: University of Gothenburg, 2009)

konflik Nuklir Korea. *Understanding the East Asian Peace* sangat fokus pada China dan sangat kuat dalam menggambarkan pembangunan perdamaian dan resolusi konflik proses tertentu yang khusus untuk hubungan internasional China. Tulisan ini menjadi salah satu pilihan penulis, dikarenakan membahas hal yang dapat dikatakan sama dengan penulis yakni mengenai konflik di kawasan Asia Timur. Namun, jika dalam buku ini membahas mengenai konflik-konflik regional Asia Timur yang berkaitan dengan China, sementara dalam skripsi ini akan membahas mengenai konflik-konflik regional Asia Timur yang berkaitan dengan Jepang.

Selanjutnya, merupakan buku yang berjudul '*The Wary Warriors: Future Directions in Japanese Security Policies*'<sup>6</sup>. Buku ini menggambarkan mengenai penilaian para penulis mengenai bagaimana perubahan baik domestic, regional, maupun internasional yang cenderung mempengaruhi kebijakan keamanan Jepang dan juga kerjasama pertahanan antara Jepang dan AS. Berfokus pada dua bidang utama dalam penilaian, yakni kebijakan luar negeri Jepang dan perspektif pada perkembangan regional dan global, serta struktur kekuatan dan kemampuan operasional SDF (*Self Defense Force*). Selain itu penulis juga memberikan data mengenai sumberdaya pertahanan Jepang dan tren pengadaan dengan maksud untuk menilai bagaimana perkembangan teknologi Jepang dan keputusan kebijakan industry cenderung mempengaruhi postur pertahanan Jepang. Lebih jauh, tim penulis juga menuliskan mengenai prospek-prospek kebijakan keamanan Jepang untuk decade mendatang, dan menuliskan bahwa di masa depan Jepang akan bergerak dalam hal persenjataan utama dan postur militer secara independen. Tulisan ini menjadi salah satu pilihan penulis, dikarenakan mengangkat tema yang sama dengan karya tulis penulis yaitu mengenai aliansi Amerika dan Jepang. Namun, jika dalam buku ini membahas mengenai bagaimana perkembangan teknologi Jepang dan kebijakan industry lebih cenderung mempengaruhi postur pertahanan Jepang, sementara dalam skripsi yang saya buat lebih membahas tentang kebijakan pertahanan Jepang dengan dinamika keamanan Asia Timur sebagai sebab dasarnya.

---

<sup>6</sup> Norman DLevine, Mark Lorell dan Arthur Alexander, "*The Wary Warriors: Future Directions in Japanese Security Policies*", (Santa Monica: RAND, 1993)

Sumber Pustaka ketiga merupakan tesis yang berjudul “*Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer*”,<sup>7</sup> peningkatan kapabilitas militer Jepang yang mengarah pada modernisasi kekuatan militernya disebabkan oleh dilemma aliansi yang muncul dalam hubungannya dengan AS. Jepang berada dalam posisi yang dihadapkan pada dua pilihan sulit yaitu memilih untuk bekerja sama (*corporate*) atau membelot (*defect*). Bekerjasama berarti memberikan komitmen yang kuat dan dukungan penuh terhadap partner aliansi dalam konflik dengan musuh, sedangkan membelot berarti menunjukkan komitmen lemah dan tidak memberikan dukungan dalam konflik dengan musuh. Keduanya sama-sama akan penempatan sebuah negara dalam pilihan yang sulit, dimana jika negara memberikan komitmen yang terlalu kuat terhadap partner, negara akan lebih besar terkena resiko jeratan ke dalam konflik partner aliansinya (*entrapment*). Sedangkan jika memberikan komitmen yang samar dan lemah terhadap partner aliansi, maka akan terkena resiko ditinggalkan (*abandonment*). Tingkat ketergantungan Jepang yang besar terhadap AS dalam aliansi tersebut membuat Jepang berada dalam posisi bahwa resiko untuk ditinggalkan melebihi resiko terjerat dalam konflik partner. Ketergantungan Jepang yang besar terhadap AS membuat Jepang memilih untuk bekerjasama dalam ruanglingkup aliansinya tersebut. Konstitusi pasca perang dikatakan tidak berlaku absolute. Interpertasi dan perluasan terhadap konstitusi dilakukan Jepang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tulisan ini menjadi salah satu pilihan penulis, dikarenakan membahas mengenai bagaimana keterkaitan aliansi Amerika – Jepang terhadap pengambilan kebijakan bagi Jepang.. Namun, jika dalam buku ini membahas mengenai sebab dari peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang, sementara dalam skripsi yang saya buat lebih membahas mengenai bagaimana kebijakan pertahanan Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan regional.

## **I.6. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjelaskan mengenai kebijakan pertahanan Jepang terhadap dinamika di kawasan Asia Timur, maka penulis menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang diharapkan dapat membantu penulis dalam penelitian.

---

<sup>7</sup> Epica Mustika Putro, “*Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer*”, FISIP UI, 2012.

### I.6.1. Konsep Kebijakan Pertahanan

Menurut David Chuter, kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang pemerintah katakan.<sup>8</sup>

*“To develop and maintain assets, including combat forces, which can be used in the support of the security policy of a state, and to ensure that coherent arrangements exist, agreed across government, for their possible employment.”*<sup>9</sup>

“Dalam membangun dan mengatur aset-aset, termasuk pasukan tempur, yang mana dapat digunakan dalam mendukung kebijakan keamanan negara, dan untuk memastikan bahwa pengaturan yang ada, disepakati pemerintah, untuk kemungkinan pekerjaan mereka.”

Dengan kata lain, kebijakan pertahanan adalah tentang menyediakan dan mengelola kemampuan yang diperlukan dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan kepada pasukan pertahanan.<sup>10</sup> Pasukan pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah secara cerdas dan terlatih dapat menjadi kekuatan utama dalam tujuan politik luar negeri suatu negara. Kepemilikan pasukan pertahanan, selama berkapasitas wajar dan terlatih, dapat mempengaruhi kemampuan negara dalam perdebatan mengenai masalah keamanan. Pasukan pertahanan yang terlatih dapat membantu proses politik internasional tanpa terlibat langsung dalam pertempuran. Sebagai contoh adalah pasukan pertahanan yang dikirim dalam operasi perdamaian, dimana pasukan netral dapat menjamin bahwa protocol demiliterisasi dijalankan pada lokasi tersebut.

Dalam kebijakan pertahanan, terdapat aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam perumusannya, antara lain *President/Prime Minister, The Foreign Ministry, The Interior Ministry, The Finance Ministry, The Intelligence Service* (staf intelligence dari Kementerian Pertahanan), dan *The Trade and Economics Ministry*. Selain aktor-aktor pemerintahan tersebut, juga terdapat sejumlah besar kelompok yang aktif di bidang pertahanan dan keamanan yang tidak memiliki status formal tapi mungkin berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan akan menawarkan nasihat yang tidak diminta. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah organisasi non-pemerintah (LSM) dan beberapa sebagai Kelompok Masyarakat

<sup>8</sup>Chuter, David. “Policy Formulation and Execution”, dalam *“Managing Defence in a democracy”*, (Cranfield University, 2006), hal 46

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Ibid, hal 47



Sipil. Karena itulah, pada negara demokrasi, para pembuat kebijakan harus sadar bahwa tidak bisa mengambil kebijakan secara internal pemerintahan karena akan berdampak pada dinamika politik keamanan dalam negeri.

Setiap kebijakan harus didasarkan pada apa yang dapat dicapai dan apa yang bisa diberikan. Ada dua hal tertentu yang perlu diingat ketika membuat hubungan ini, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Memikirkan mengenai segala implikasi dari sebuah kebijakan. Sebagai contoh dalam sebuah peran dalam menjaga keamanan regional, perlu diperhatikan mengenai pelatihan dan pelaksanaan latihan baik komandan maupun prajurit. Penyediaan bahan logistic dan pengaturan transportasi, komunikasi yang memadai, dan kesejahteraan serta ketersediaan medis. Bahkan hal kecil mengenai pakaian atau ketersediaan suku cadang kendaraan dapat berakibat gagalnya misi pelaksanaan Kebijakan pertahanan merupakan hal penting dalam menjalankan langkah dan tindakan yang akan dibuat oleh negara.
- b. Menyangkup program pertahanan secara keseluruhan, termasuk struktur kekuatan dan peralatan. Seluruh kegiatan harus mendukung dan terkait dengan kebijakan yang telah disepakati.

### **I.6.2. Teori Keamanan Regional**

Snyder mengartikan region sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dalam satu wilayah tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan suatu kawasan membutuhkan stabilitas yang kuat dalam menjamin terciptanya hubungan antar negara kawasan yang baik, untuk itu diperlukan kesepakatan satu sama lain untuk mencapai stabilitas kawasan. Terdapat dua hal yang menjadikan regional security sangat penting yaitu:

- a. Karena regional security sebagai elemen pembentuk keamanan internasional ataupun konflik internasional.<sup>13</sup> Keamanan regional merupakan hal utama sebagai upaya menciptakan stabilitas internasional.

<sup>11</sup> Ibid, hal 57

<sup>12</sup> Craig A Snyder, "Contemporary Security and Strategy". (Palgrave : Macmillan, 2008), p228.

<sup>13</sup> Kriesberg, Louise. *Regional Conflicts in the Post-Cold War Era: Causes, Dynamics, and Modes of Resolution*. 1994. p.155.

- b. Karena regional security akan mempengaruhi keamanan nasional setiap negara dalam kawasan tersebut.<sup>14</sup> Regional Security akan menjadikan dasar pendukung baik untuk stabilitas ekonomi maupun politik negara kawasan.

Dalam membahas mengenai regional security, realis memandang system internasional adalah anarkis, yaitu system dimana terdiri dari negara-negara berdaulat yang bertujuan mempertahankan diri dan kepentingan nasionalnya. Dalam berinteraksi, negara selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya dan tidak mengenal batas-batas institusi internasional apapun, sehingga peningkatan kekuatan militer merupakan unsur penting. Sedangkan liberalis memandang bahwa kepentingan suatu negara tidak terlepas dari kepentingan negara lain sehingga saling ketergantungan. Lebih lanjut, liberalis berasumsi bahwa hubungan antar negara didasarkan atas dasar kepentingan bersama yakni untuk memajukan kepentingan ekonomi, maka dari itu hal-hal seperti mencegah perang, memajukan nilai demokrasi, dan mengembangkan norma kerjasama regional dan internasional adalah hal yang harus dilakukan.

Dalam menciptakan stabilitas kawasan tidak terlepas dari ancaman yang dapat mengganggu keamanan regional atau regional security, antara lain:<sup>15</sup>

- a. *Grass fire Conflicts*, yakni ancaman yang berupa konflik yang terjadi antar negara karena permasalahan-permasalahan local. Misalnya permasalahan politik, ekonomi dan etnis yang melibatkan issue di negara lain. Pada umumnya, konflik ini didorong oleh dua hal : masalah pemicu dan permasalahan mendasar yang memang sudah ada dan menjadi sengketa. Misalnya, masalah perebutan wilayah.
- b. *Intra-state Conflicts*, yakni ancaman regional yang berupa konflik internal di suatu negara tertentu di dalam kawasan tersebut. Meskipun demikian, konflik tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan dengan negara lain yang memiliki hubungan tidak langsung terhadap konflik. Misalnya konflik etnis minoritas di satu negara dimana etnis tersebut menjadi etnis mayoritas di negara yang lain.

<sup>14</sup>Barry Buzan, "People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era". London : Pinter. P187

<sup>15</sup>Craig A. Snyder, *Loc.cit.*

c. *Transnational Threats*, yakni ancaman yang tidak berasal dari isu keamanan tradisional seperti layaknya ketiga ancaman di atas. Ancaman ke empat ini merupakan konflik yang berasal dari masalah lingkungan, ketidakadilan ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan juga isu-isu migrasi. Ancaman ini tidak memerlukan penanganan secara militer. Namun jika tidak ditangani akan mengancam kawasan secara keseluruhan, tidak hanya satu negara saja.

### **I.6.3. Konsep *Security Dilemma***

Dilemma keamanan muncul ketika adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya, namun disatu sisi ini menimbulkan reaksi dari negara lain yang juga ingin meningkatkan keamanannya, yang pada akhirnya reaksi ini menyebabkan penurunan keamanan di negara pertama. Negara harus berjuang mempertahankan eksistensinya. Hal ini memicu adanya *security dilemma*, yaitu sistem anarki sebagai sistem internasional. Sistem anarki itu sendiri yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi dan tidak ada pemerintahan dunia. Dalam sistem pemerintahan internasional yang anarki, semua negara membutuhkan keunggulan power dan keamanan. Negara harus memiliki sarana kekuatan seperti militer, persenjataan, sebagai bukti bahwa negara itu kuat, dan juga sebagai alat pertahanan jika ada ancaman atau serangan dari negara lain. Menurut Barry R. Posen, kondisi anarki tersebut membuat keamanan adalah *first concern* bagi suatu negara.<sup>16</sup> Dengan adanya kekuatan ini, yang mana tujuan utama dari negara dengan keberadaan kekuatan tersebut, yaitu untuk menjaga keamanan dan mempertahankan diri, disisi lain hal ini juga akan memicu rasa khawatir negara lain yang nantinya negara tersebut akan memperkuat militernya. Ini dilakukan karena adanya perasaan terancam dan rasa takut diserang oleh negara lain yang berkekuatan lebih.

Sebuah dilema keamanan mengacu pada situasi di mana dua atau lebih negara yang terseret ke dalam konflik, bahkan mungkin perang, karena alasan keamanan, meskipun tak satu pun dari negara benar-benar menginginkan konflik. Pada dasarnya, dilema keamanan terjadi ketika dua atau lebih negara masing-

<sup>16</sup>Barry R. Posen. Security dilemma and ethnic conflict, diunduh dari <http://www.sais-jhu.edu/cmtoolkit/pdfs/posen-1993.pdf> pada 20 Agustus 2014

masing merasa tidak aman dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Tak satu pun dari negara yang terlibat ingin hubungan memburuk, apalagi untuk dinyatakan perang, namun karena setiap negara bertindak secara militer atau diplomatis untuk membuat dirinya lebih aman, negara-negara lain menafsirkan tindakannya sebagai ancaman. Sebuah siklus ironis provokasi yang tidak diinginkan muncul, yang mengakibatkan eskalasi konflik yang akhirnya dapat menyebabkan membuka peperangan.<sup>17</sup>

### I.7. Alur Pemikiran



### I.8. Asumsi

- a. Dinamika keamanan Asia Timur yang semakin dinamis mendasari pemerintah Jepang untuk tidak lagi 'bermain' secara pasif di *region* tersebut.
- b. Pergantian dari Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defence Agency*) menjadi Departemen Pertahanan (*Ministry of Defense*) membawa perubahan yang signifikan terhadap Kebijakan Pertahanan Jepang.

<sup>17</sup> <http://www.irtheory.com/know.htm>, diakses pada 20 Agustus 2014

- c. Dinamika Asia Timur yang dinamis menuntut Jepang untuk terus melakukan peningkatan dalam kebijakan pertahanannya. Dalam pembuatan kebijakan, terutama kebijakan pertahanan, Jepang tidak pernah terlepas dari pengaruh aliansinya bersama Amerika Serikat.

## **I.9. Metode Penelitian**

### **I.9.1. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Penggambaran secara relevan mengenai permasalahan dari penelitian yang penulis lakukan. Diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan pertahanan Jepang dalam aliansi Jepang-AS dalam menghadapi dinamika pertahanan Asia Timur.

### **I.9.2. Jenis Data**

Adapun mengenai jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Buku Putih Pertahanan Jepang ditahun 2007 sampai dengan 2009. Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis merupakan data yang diperoleh dari studi literature dari buku-buku, jurnal terbitan resmi, majalah, surat kabar, serta beberapa situs internet yang berkaitan dengan studi Hubungan Internasional dan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

### **I.9.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada Studi Kepustakaan (*library research*). Dengan studi kepustakaan ini membantu penulis menemukan berbagai data dan fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### **I.9.4. Teknik Analisis Data**

Selanjutnya untuk menganalisis data dari penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Teknis tersebut

membantu penulis dalam menggambarkan permasalahan yang didasarkan oleh fakta, yang kemudian mencari keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

#### **I.10. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

mengenai pendahuluan, yang pembahasannya meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II DINAMIKA KEAMANAN DI ASIA TIMUR**

mengenai bagaimana dinamika keamanan yang terjadi di Asia Timur

##### **BAB III KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG**

mengenai kebijakan pertahanan Jepang dalam pada periode 2007-2009.

##### **BAB IV kesimpulan dan saran.**

##### **DAFTAR PUSTAKA**

